KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penunjukan Ketua DPR: Golkar Cari Jalan Keluar
Tanggal : Selasa, 12 Desember 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

PENUNJUKAN KETUA DPR

Golkar Cari Jalan Keluar

JAKARTA — Badan Musyawarah DPR menerima pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Namun, alat kelengkapan parlemen itu menunda pengesahan Aziz Syamsuddin sebagai pengganti Setnov dan mengembalikan kepada mekanisme Partai Golkar.

John A. Oktaveri & Lingga S. Wiangga
redaksi@bisnis.com

Sebagian besar anggota Fraksi Partai Golkar di DPR meminta proses penunjukan Ketua DPR melalui rapat pleno, kendati Aziz Syamsuddin menegaskan bahwa surat Setnov—panggilan Setya Novanto—bersama jajaran pengurus partai berlambang pohon beringin itu, telah sesuai mekanisme.

Semakin ruwetnya persoalan di internal Golkar sejak Setnov, yang menjabat ketua umum partai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus segera dicarikan jalan keluar.

Apabila Aziz Syamsuddin dipaksakan menjadi Ketua DPR sebelum digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub), berpotensi memunculkan persoalan baru ke depannya.

Politisi senior Partai Golkar yang juga mantan Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan bahwa jika penunjukan Ketua DPR dilakukan sebelum Munaslub, Ketua Umum Golkar terpilih bisa saja mengganti kembali pimpinan lembaga tinggi negara tersebut.

"Kami para senior sudah menganjurkan kalau boleh diadakan Munaslub dulu. Munaslub direncanakan pada pertengahan 17-19 Desember ini, setelah itu DPP yang baru menentukan siapa yang jadi pimpinan DPR," ujar Fadel di Kompleks Parlemen, Senin (11/12).

Menurutnya, Golkar tidak perlu memaksakan diri untuk menentukan siapa Ketua DPR sesuai kehendak beberapa orang.

Fadel meyakini akan terjadi pergantian Ketua DPR lagi yang dikehendaki oleh pimpinan ketua Golkar yang terpilih..

"Ini tak bagus buat sebuah lembaga tinggi negara. Kami sebagai senior dan saya sudah empat kali pengurus DPP. Sekali pengurus DPD I Partai Golkar merasa malu dengan melihat permasalahan yang kita hadapi sampai hari ini. Mudah-mudahan jangan lagi terulang sekarang," tambahnya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan pengunduran diri Setnov sudah disetujui rapat Bamus DPR. Terkait pergantian Ketua DPR, harus dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan dari 91 orang anggota fraksi Partai Golkar di DPR, sebanyak 50 di ataranya menolak penunjukan Aziz sebagai Ketua DPR.

Menurutnya, dalam penetapan kebijakan strategis dalam tubuh partai selalu ada mekanisme prosedural.

Sementara itu, Aziz mengatakan surat penunjukan dirinya menjadi Ketua DPR yang paling penting sudah ditandatangani ketua umum partai, sekretaris jenderal dan dewan Pembina sehingga sah.

Dia mengklaim hal itu tak perlu dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar dan tak bertentangan dengan aturan partai.

Dalam kesempatan lain, pengamat politik LIPI Siti Zuhro menuturkan mekanisme penunjukkan seorang kepala lembaga tinggi negara, termasuk DPR, tidak bisa main-main atau berupa keputusan pribadi.

Surat yang dikeluarkan Setnov menurutnya bersifat pribadi apalagi dikeluarkan oleh seseorang yang tengah bermasalah dengan hukum.

Menurutnya, keputusan itu tidak aspiratif dan juga tidak mewakili semua pihak di dalam tubuh Partai Golkar. "Surat sakti pak Novanto itu merupakan surat pribadi, tidak mewakili Golkar. Ini seperti *one man show*, main-main karena ditentukan oleh satu orang," ungkapnya.

Pada bagian lain Siti Zuhro juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Setnov akan merugikan Aziz Syamsuddin sendiri. Pasalnya, tidak semua unsur di Golkar akan menerima politisi muda yang kini menjadi Ketua Badan Anggaran DPR tersebut.

Siti Zuhro mengatakan kalau kondisi kisruh di tubuh Golkar terus dibiarkan maka dikhawatirkan partai yang pada pemilu lalu mampu meraih suara sekitar 14% bisa terpuruk menjadi partai kelas menengah.

Bukan tidak mungkin partai itu akan kehilangan separuh dari suaranya pada pemilu lalu atau meraih sekitar 7% kalau kepercayaan publik terus tergerus akibat berbagai persoalan yang terus mendera partai itu.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan keputusan mundurnya Setnov dari posisi Ketua DPR setelah ditahan KPK karena kasus korupsi KTP berbasis elektronik sangat terlambat.

Dia menilai, tindakan Setya Novanto itu mengulangi strategi lama, sama seperti saat tersangkut kasus 'Papa Minta Sa-

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

nam. Saat itu Setya Novanto pada awalnya tetap bertahan di tengah desakan publik agar dirinya mundur.

Setya Novanto berupaya memanfaatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk membebaskannya dari desakan publik. Sayangnya MKD yang terus dikritik publik menyimpulkan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan Setnov yang membuatnya harus diberhentikan dari posisinya tersebut.

Ketika mengetahui arah keputusan MKD, kata dia, Setya Novanto dengan cepat membacakan keputusan mengundurkan diri. MKD pun akhirnya tak sampai pada puncak pengambilan keputusan akhir terhadap status Setya Novanto.

Pengunduran diri ini sekaligus membersihkan Setya Novanto dari vonis melanggar etika sebagaimana disimpulkan oleh MKD. ■